



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 100.3.2/107/PO.Hukum-G.ST/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 100.3.2/519/RO.HUKUM-G.ST/2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.3.2/519/RO.HUKUM-G.ST/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2026 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.2/519/RO.HUKUM-G.ST/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.2/519/RO.HUKUM-G.ST/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Perangkat Daerah Pengusul menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Gubernur dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lambat untuk dilakukan pengharmonisasian tanggal 30 September 2026.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Mei 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL GUBERNUR	
SEKDA PROV.	
ASISTEN PEM. & KESRA	
KA. BIRO HUKUM	


ANWAR HAFID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 100.3.2/107/RO.HUKUM - G.ST/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR

100.3.2/519/RO.HUKUM-G.ST/2025

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR

SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKS ANAAN	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	
			BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Standar Pelayanan Publik	Baru		TW I	Biro Organisasi	
2.	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN	Baru		TW I	Biro Organisasi	

3.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan	- pengembangan potensi pemuda - Penghargaan penyelenggaraan kepemudaan - Kordinasi dan kemitraan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan - Pengawasan keolahragaan	Baru		TW I	Dinas Pemuda dan Olahraga
4.	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB)	Trantibunlinmas Penanggulangan Bencana	Baru		TW I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Baru		TW I	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.	Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	- Arah kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan difokuskan pada peningkatan produksi tanaman,	Baru		TW I	Dinas Perkebunan dan Peternakan

		pengembangan perkebunan kelapa sawit, pemantapan penguatan korporasi petani, peningkatan mutu hasil dan pengembangan industri turunan dan olahan kelapa sawit. - Integrasi program dan kegiatan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan meliputi penguatan data, koordinasi dan infrastruktur; peningkatan kapabilitas dan kapasitas pekebun; pengolahan dan pemantauan lingkungan; tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan dukungan percepatan ISPO serta peningkatan akses				
--	--	--	--	--	--	--

		pasar produk kelapa sawit. - Penyelenggaraan, pelaksanaan dan sistematika rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit.				
7.	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2026	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2026	Baru		TW I	Dinas Perhubungan
8.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Berdasarkan Hasil Kerjasama Daerah Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Berdasarkan Hasil Kerjasama Daerah Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	Baru		TW I	BAPENDA

9.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas	Baru		TW I	BPKAD
10.	Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	Baru		TW II	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11.	Pedoman Pengelolaan Keuangan Kegiatan Swakelola di Pemerintah Sulawesi Tengah	Pedoman Pengelolaan Keuangan Kegiatan Swakelola di Pemerintah Sulawesi Tengah	Baru		TW II	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
12.	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah		Ubah	TW II	Biro Organisasi

13.	Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2030	Kordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di provinsi sulawesi tengah	Baru		TW II	Dinas Pemuda dan Olahraga
14.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok	- Sanksi administratif - Tata cara pemberian penghargaan - Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan tugas KTR dan hubungan tata cara kerja dengan unit satuan tugas KTR	Baru		TW II	Dinas Kesehatan
15.	Perikanan Gurita Berkelanjutan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Provinsi Sulawesi Tengah	Perikanan Gurita Berkelanjutan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Provinsi Sulawesi Tengah	Baru		TW II	Dinas Kelautan dan Perikanan
16.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Baru		TW II	Dinas Pangan

17.	Analisis Standar Belanja	Analisis Standar Belanja Fisik dan Non Fisik	Baru		TW II	BPKAD
18.	Cetak Biru Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan	Cetak Biru Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Pertambangan	Baru		TW II	ESDM
19.	Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga	Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga	Baru		TW II	DP3A
20.	Perubahan atas Pergub Nomor 62 Tahun 2013 tentang Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah	Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah	Baru		TW II	DP3A
21.	Pola tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Pada Dinas Pendidikan	Pola tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah	Baru		TW II	Dinas Pendidikan

22.	Penerapan Hasil Inovasi Daerah	Penerapan Hasil Inovasi Daerah	Baru		TW II	BRIDA
23.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2025-2029	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah		Ubah	TW II	BRIDA
24.	Pola tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Laboratorium Kesehatan	Pola tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah	Baru		TW II	DINAS KESEHATAN (UPT LABORATORIUM KESEHATAN)
25.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil	Baru		TW II	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

26.	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Baru		TW II	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
27.	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Baru		TW II	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
28.	Pola tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata	- Pola tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata - Pedoman Pengangkatan Pejabat dan Pegawai BLUD Non ASN dari Tenaga Profesional lainnya pada RSUD Undata - Pembina dan Pengawas BLUD pada RSUD	Baru		TW II	DINAS KESEHATAN (UNDATA)

		Undata Provinsi Sulawesi Tengah - Penunjukan pejabat pengelola BLUD pada RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah - Penetapan dewan pengawas BLUD pada RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah				
29.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah		Ubah	TW II	DINAS PENDIDIKAN
30.	Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian provinsi sulawesi tengah	Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian provinsi sulawesi tengah	Baru		TW III	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
31.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Baru		TW III	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

32.	RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2027	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Baru		TW III	BAPPEDA
33.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026	RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026		Ubah	TW III	BAPPEDA
34.	Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah	- Forum Komunikasi Riset dan Inovasi Daerah - Peran Serta Masyarakat Terhadap Inovasi Daerah - Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Inovasi Daerah	Baru		TW III	BRIDA
35.	Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan dan Pajak Alat Berat Tahun 2026	Dasar perhitungan baru PKB, BBNKB, dan PAB	Baru		TW III	BAPENDA

36.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah	Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah		Ubah	TW III	BAPENDA
37.	Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Perubahan SOTK Dispora, Bapenda, Dinas Pangan dan BPKAD			TW III	BIRO ORGANISASI
38.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045	Menyusun arah kebijakan penanaman modal, peta panduan (road map) implementasi rencana umum penanaman modal dan kelembagaan yang melaksanakan RUPM	Baru		TW III	DPMPTSP
39.	Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Baru		TW IV	Biro Organisasi

40.	Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Budaya Kerja BerAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Baru		TW IV	Biro Organisasi
41.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan	Delegasi perda no 1 tahun 2024	Baru		TW IV	Dinas Kesehatan
42.	Pengadaan Barang dan Jasa BLUD RSUD UNDATA				TW IV	DINAS KESEHATAN (UNDATA)
43.	Remunerasi Pada RSUD UNDATA				TW IV	DINAS KESEHATAN (UNDATA)

PARAF KOORDINASI	
WAKIL GUBERNUR	
SEKDA PROV.	
ASISTEN PEM. & KESRA	
KA. BIRO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID